

Katalog : 4601007.12

Profil

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Profil

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2022



**Profil Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Sumatera Utara 2022**

ISSN: 2620-5696

**No. Publikasi/Publication Number: 12000.2334
Katalog BPS/BPS Catalogue: 4601007.12**

**Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman/Number of Pages: x + 22 Halaman/Pages**

**Naskah/Manuscript:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics Sumatera Utara Province**

**Penyunting/Editor:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics Sumatera Utara Province**

**Gambar Kulit/Cover Design:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics Sumatera Utara Province**

**Diterbitkan oleh/Published by:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara/ ©BPS-Statistics Sumatera Utara Province**

**Dicetak oleh/Printed by:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics Sumatera Utara Province**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**
*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for
commercial purposes without permission from BPS-Statistics of Indonesia*

TIM PENYUSUN

PROFIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA 2022

Pengarah

Nurul Hasanudin, SST., M. Stat.

Penanggungjawab

Azantaro, SE., M.Si

Editor

Cahyono Panca Aridesyadi, SST

Penulis

Dahril Iskandar

Desain Kulit

Prio Arif Budiman

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat menerbitkan Publikasi Profil Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 2022.

IDI merupakan alat ukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan masyarakat dengan mengandalkan pada data empiris, mendasarkan pada peristiwa yang diamati dan terukur. Setelah pengumpulan dan pengolahan data oleh BPS, selanjutnya diverifikasi bersama dengan Dewan ahli IDI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

IDI 2022 mencatat peristiwa dan perilaku berdemokrasi sepanjang tahun 2022. Publikasi Profil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara 2022 mencakup data hasil penghitungan IDI tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan metode baru.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perilaku yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan untuk pencapaian nilai-nilai demokrasi.

Medan, September 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara



Nurul Hasanudin, SST., M. Stat.

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik	ix
1. Landasan Konseptual	1
2. Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)	2
3. Metode Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia	6
4. Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	8
5. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2021 – 2022	8
6. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara 2021 – 2022	9
7. Capaian Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2022	14
8. Perubahan Indeks Indikator pada Indeks Demokrasi IDI Sumatera Utara 2022	17
Lampiran	21

Daftar Grafik

1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2021-2022	8
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2021-2022	9
3. Nilai Indeks pada Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021-2022	10
4. Perubahan Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021-2022	10
5. Nilai Indeks pada Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021-2022	11
6. Perubahan Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2022-2021	12
7. Nilai Indeks pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021-2022	13
8. Perubahan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021- 2022	13
9. Indeks Indikator IDI Sumatera Utara 2022	14
10. Nilai Perubahan Indikator IDI Sumatera Utara 2022 terhadap 2021 (poin)	18

1. Landasan Konseptual

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan tingkat keragaman yang besar pula, apakah itu dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, konflik komunal, dan lain-lain. Karena itu, menjadi sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu, dan kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut untuk pembuatan rencana pembangunan politik dan demokrasi di semua provinsi dan juga kabupaten/kota di Indonesia.

Awalnya Indonesia dinilai oleh dunia sebagai sebuah negara demokrasi, sejak *Freedom House* (2008), memasukan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara “bebas secara penuh” di dunia, didasarkan atas “indeks kebebasan”.

Dalam konteks itulah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi krusial, sebagai alat ukur empirik dan sederhana untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di tanah air. Untuk tujuan itu maka menjadi sangat fundamental memahami apa yang dimaksud dengan “demokrasi” itu sendiri. Dari pengertian atau definisi ini, kemudian dapat diturunkan dimensi-dimensinya, kemudian variabel-variabel dan indikator-indikatornya. Dengan teknik pembuatan indeks dari indikator-indikator itu akan terbentuk IDI yang dapat diturunkan hingga tingkat provinsi di tanah air.

Untuk itulah mulai tahun 2009 BPS mulai menghitung ukuran demokrasi, yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada kultur dari bangsa Indonesia ini sendiri. Pemerintah Indonesia melakukan pengukuran terhadap demokrasi secara berkala dengan merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahun sejak 2009. IDI mengukur dinamika perkembangan demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. IDI menghasilkan skor yang merujuk pada tiga kategori, yaitu rendah (nilai indeks kurang dari 60), sedang (nilai indeks 60-80), dan tinggi (nilai indeks di atas 80).

2. Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)

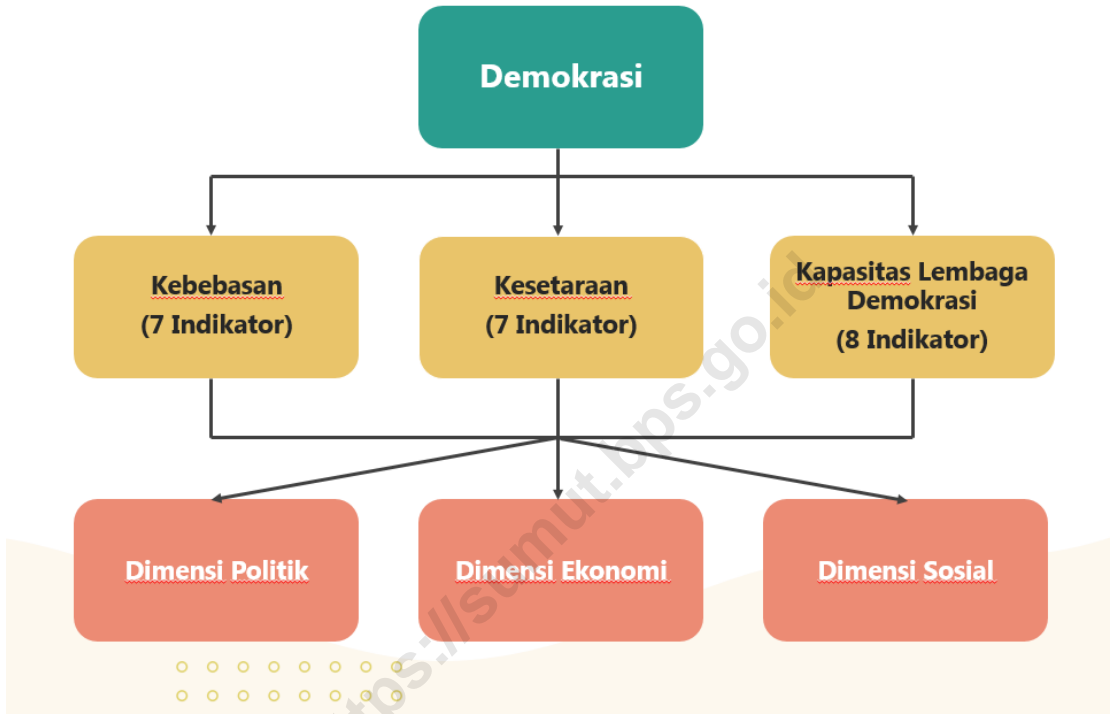
Demonopolisasi merupakan konsep dasar dalam riset indeks demokrasi Indonesia (IDI) metode baru yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Merujuk Bagan 1 di bawah maka jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut. Dengan metode baru sekarang ini akan diperoleh tiga nilai indeks:

- Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi
- Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Diagram 1.

Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru



2.1 Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

Tabel 1. Indikator-indikator Penyusun Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KEBEBASAN	1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.	Politik
	2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.	Politik
	3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.	Sosial
	4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.	Politik
	5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.	Politik
	6. Pemenuhan hak-hak pekerja.	Ekonomi
	7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Politik, Ekonomi, dan Sosial

2.2 Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial

Tabel 2. Indikator-indikator Penyusun Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KESETARAAN	8. Kesetaraan gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial
	9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik
	10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi
	11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Ekonomi
	12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Ekonomi
	13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik
	14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial

2.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial

Tabel 3. Indikator-indikator Penyusun Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	15.Kinerja Lembaga Legislatif	Politik
	16.Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik
	17.Netralitas Penyelenggara Pemilu	Politik
	18.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik
	19.Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial
	20.Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	Politik
	21.Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik
	22.Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik

3. Metode Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia

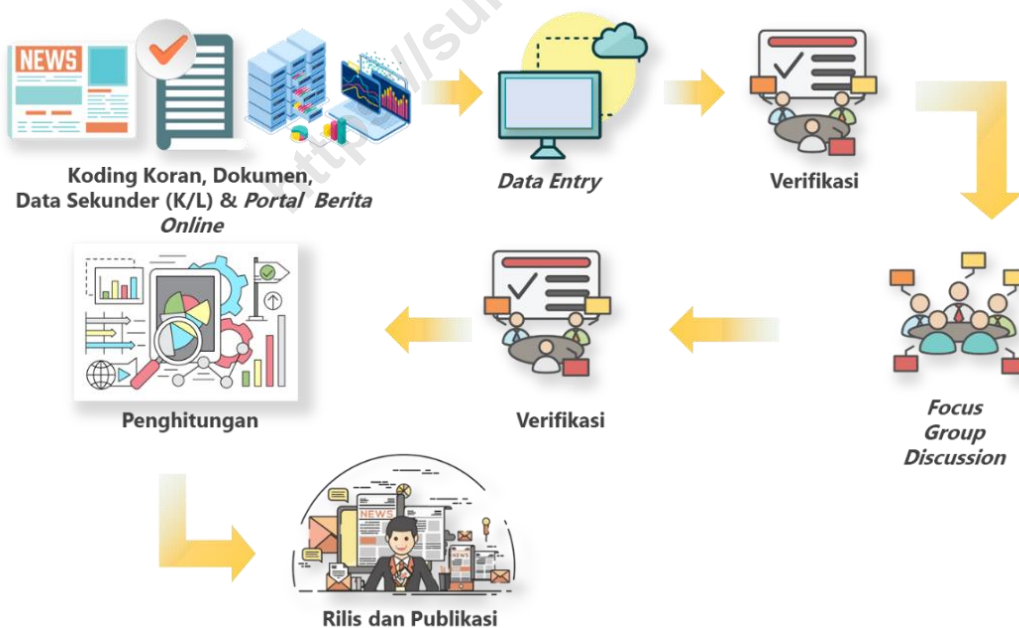
Metode penghitungan IDI tetap menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan ini bermanfaat bagi ilmuwan sosial untuk

memperlihatkan kepercayaan yang lebih besar pada temuan mereka *Webb et al* (dalam Bryman, 1988: 130).

Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita *online*, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta LSM.

Metode penyusunan IDI bisa dilihat melalui ilustrasi berikut:

Diagram 2.
Metoda Pengumpulan data IDI



4. Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki rentang nilai dari 0 - 100, dimana semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik.

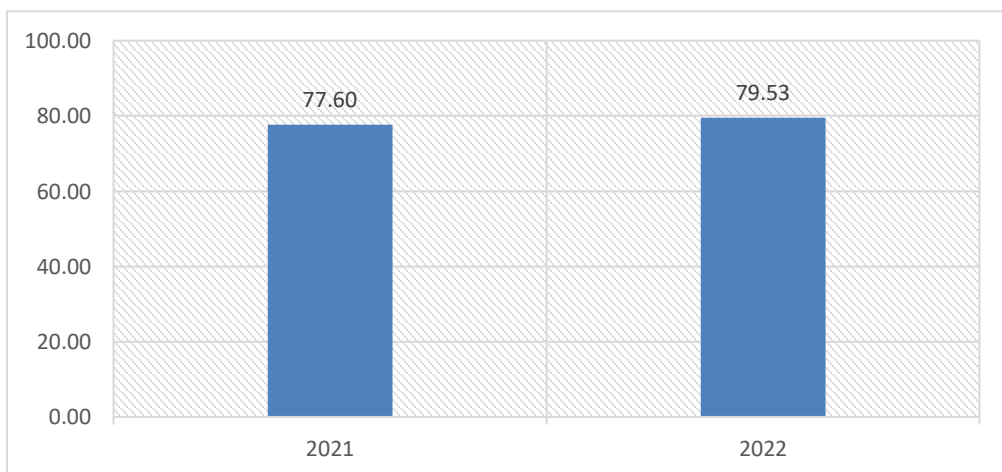
Tabel 4. Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks	Makna
< 60	KINERJA DEMOKRASI BURUK
60 – 80	KINERJA DEMOKRASI SEDANG
> 80	KINERJA DEMOKRASI BAIK

5. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2021 – 2022

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 79,53 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,93 poin dibandingkan dengan IDI 2021 yang sebesar 77,60, walaupun angka tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

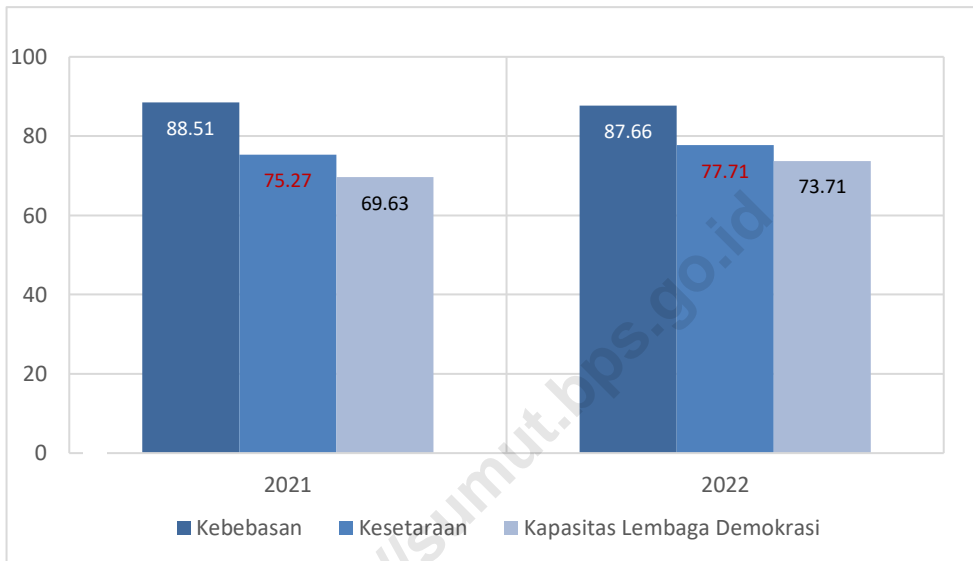
Grafik 1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2021-2022



6. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara 2021 – 2022

Angka IDI Sumatera Utara 2022 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan dengan rata-rata 87,66; aspek Kesetaraan 77,71; dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 73,71.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2021-2022



6.1 Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021–2022 dengan Indikator pembentuknya

Aspek Kebebasan dibentuk dari 7 indikator, ketujuh indikator sebut adalah:

Indikator 1 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.

Indikator 2 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat

Indikator 3 : Terjaminnya kebebasan berkeyakinan

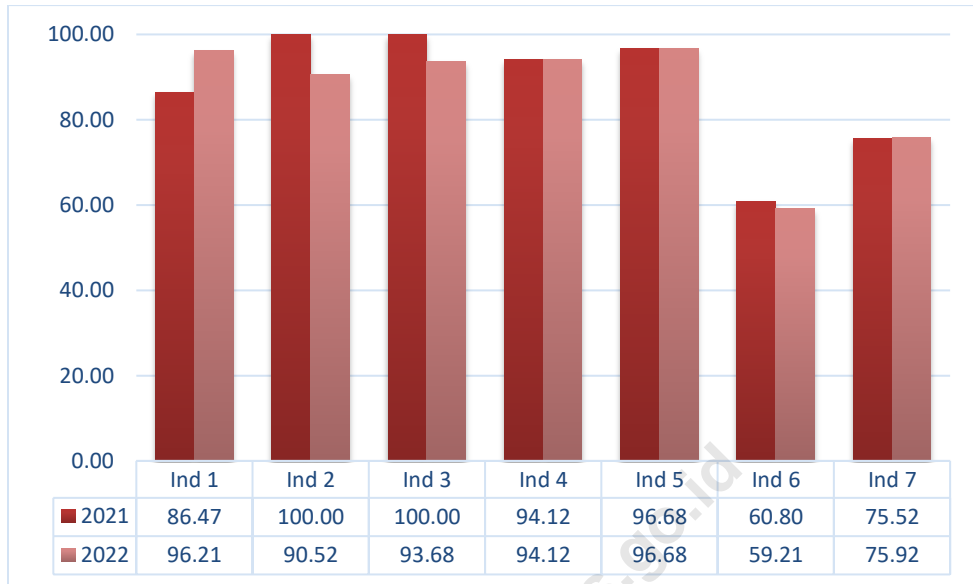
Indikator 4 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan

Indikator 5 : Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu

Indikator 6 : Pemenuhan hak-hak pekerja

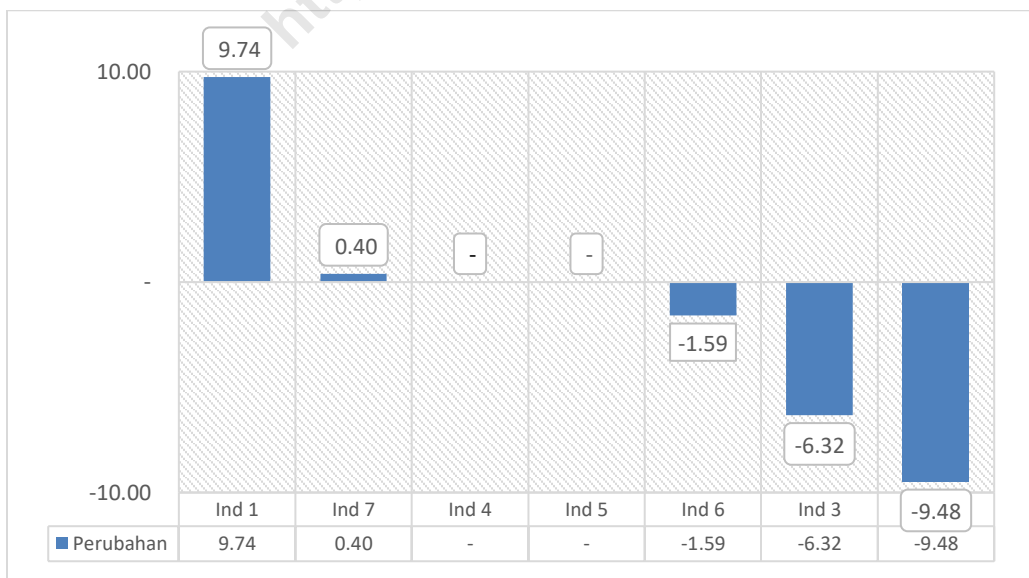
Indikator 7 : Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Grafik 3. Nilai Indeks pada Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021 dan 2022



Pada tahun 2022, Aspek Kebebasan turun sebesar 0,85 poin menjadi 87,66 pada 2022. Walaupun indikator 1 dan 7 mengalami peningkatan, namun turunnya indikator 2 dan 3 yang cukup signifikan sebesar masing-masing 9,48 poin dan 6,32 poin dan indikator 6 yang turun tipis sebesar 1,59 Poin, menyebabkan nilai indeks untuk Aspek Kebebasan ini turun.

Grafik 4 Perubahan Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021-2022



6.2 Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021 – 2022 dengan Indikator pembentuknya

Aspek Kesetaraan dibentuk dari 7 indikator, ketujuh indikator sebut adalah

Indikator 8 : Kesetaraan gender

Indikator 9 : Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan

Indikator 10 : Anti monopoli sumber daya ekonomi

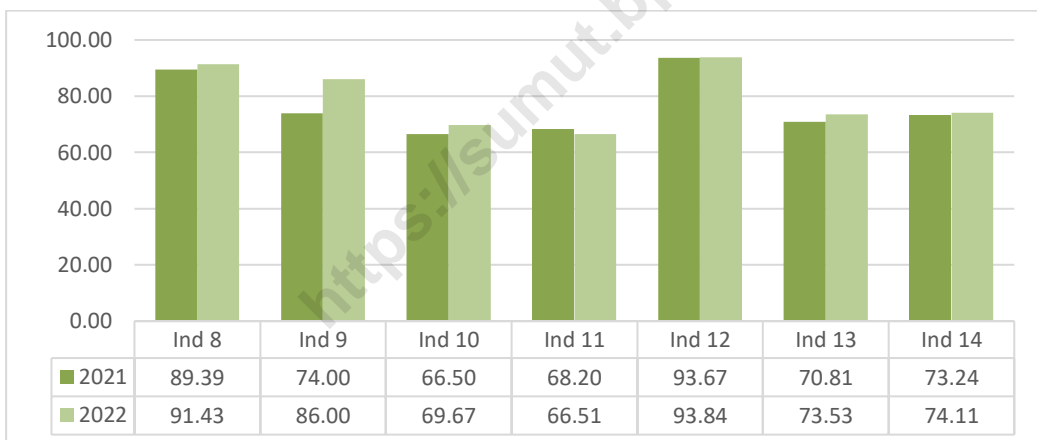
Indikator 11 : Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial

Indikator 12 : Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah

Indikator 13 : Akses masyarakat terhadap informasi publik

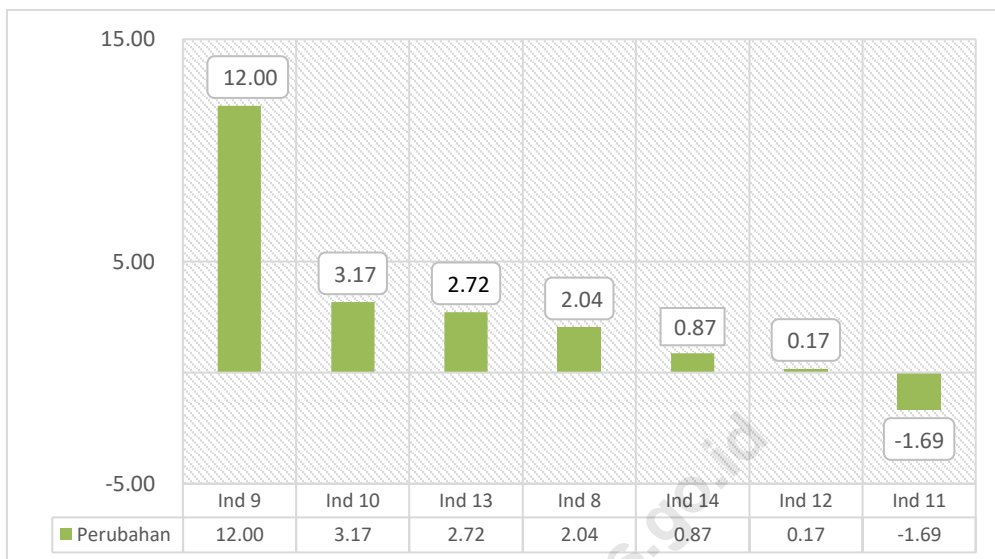
Indikator 14 : Kesetaraan dalam pelayanan dasar

Grafik 5 Nilai Indeks pada Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021-2022



Aspek Kesetaraan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,44 poin, dari 75,27 pada tahun 2021 menjadi 77,71 pada tahun 2022, dan masuk dalam kinerja demokrasi Sedang. Pada Aspek Kesetaraan hanya 1 indikator yang mengalami penurunan, yaitu Indikator 11, sementara enam indikator yang lain mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada indikator 9, sebesar 12 poin.

Grafik 6 Perubahan Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021-2022



6.3 Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021 – 2022 dengan Indikator pembentuknya

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dibentuk dari 8 indikator, kedelapan indikator sebut adalah

Indikator 15 : Kinerja lembaga legislatif

Indikator 16 : Kinerja lembaga yudikatif

Indikator 17 : Netralitas penyelenggara pemilu

Indikator 18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah

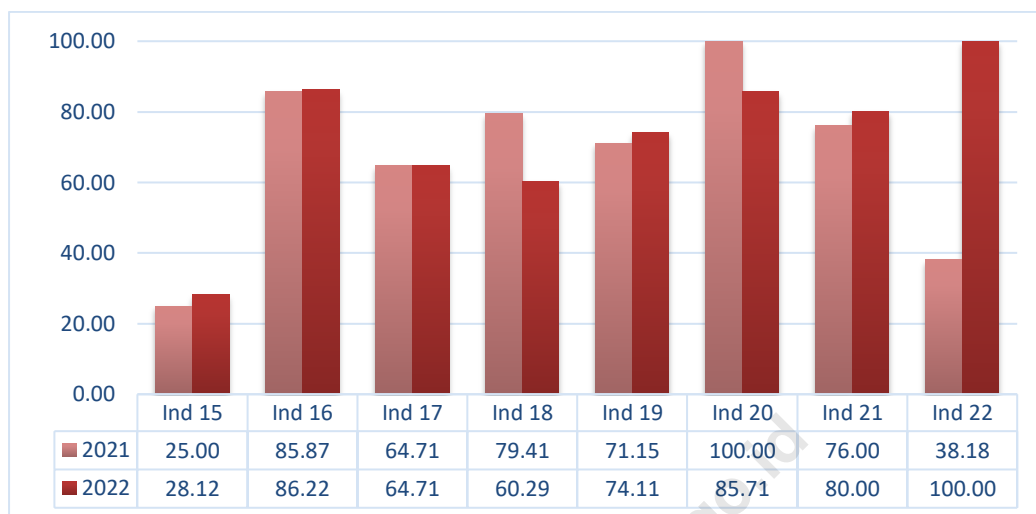
Indikator 19 : Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat

Indikator 20 : Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah

Indikator 21 : Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik

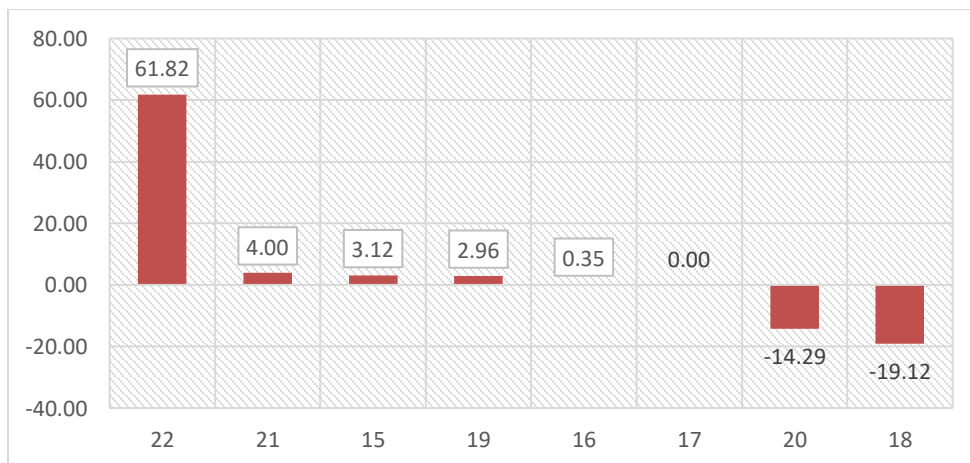
Indikator 22 : Pendidikan politik pada kader partai politik

Grafik 7. Nilai Indeks pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021 dan 2022



Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada tahun 2022 sebesar 73,71 poin, naik cukup signifikan sebesar 4,08 poin jika dibandingkan dengan nilai Aspek ini pada tahun 2021. Dari delapan indikator pendukung aspek ini, hanya dua indikator yang mengalami penurunan yaitu indikator 18 dan 20 dan penurunannya cukup tajam dimana masing-masing turun sebesar 19,12 poin dan 14,29 poin. Namun penurunan tajam tersebut diimbangi dengan peningkatan yang sangat signifikan pada indikator 22 sebesar 61,82 poin, dan peningkatan 4 indikator lainnya, sementara indikator 17 tetap.

Grafik 8. Perubahan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2022 dibanding 2021

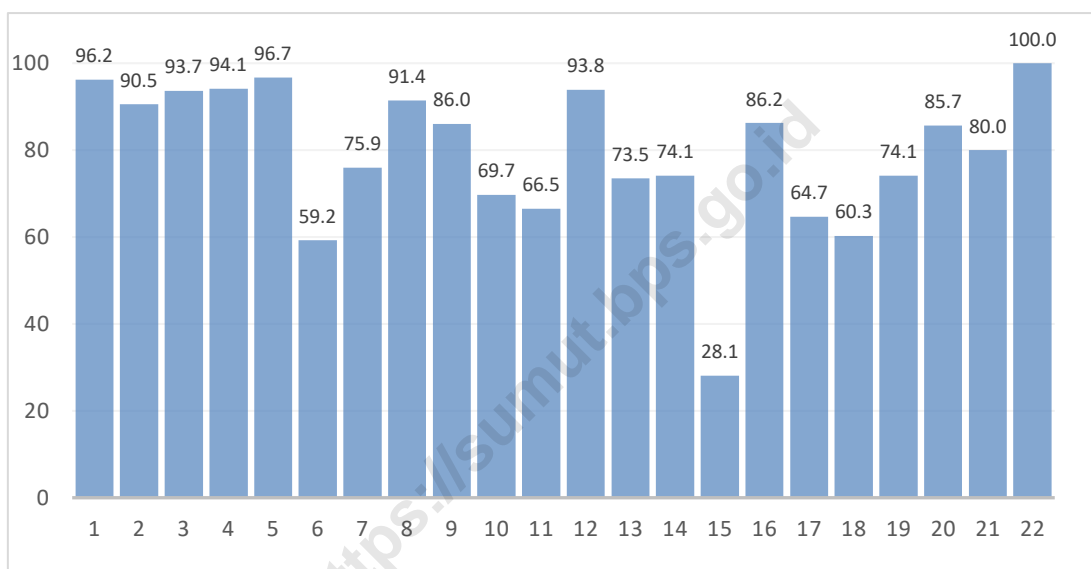


7. Capaian Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2022

Nilai Indeks indikator IDI 2022 Sumatera Utara tertinggi ada pada indikator 22 yaitu Pendidikan Politik pada kader partai politik, sebesar 100.00 poin. Dan terendah pada indikator 15 yaitu Kinerja Lembaga Legislatif sebesar 28.12 poin.

Berikut grafik nilai indek indikator IDI Sumatera Utara tahun 2021.

Grafik 9. Indeks Indikator IDI Sumatera Utara 2022



- Indikator dengan Kinerja Baik

Dari 22 indikator pada IDI Sumatera Utara terdapat 12 indikator masuk pada kategori Baik. Keduabelas indikator tersebut tampil dalam tabel 5, yang diurutkan dari indikator poin terbesar sampai poin terkecil dalam kategori baik. Indikator tertinggi pada Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (indikator 22) sebesar 100,00 poin dan yang terendah dalam kategori ini adalah Indikator Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (indikator 21) sebesar 80,00 poin

Tabel 5. Indikator dengan Kinerja Baik Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2022

Indikator dengan kinerja baik		2022
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	96,68
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	96,21
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	94,12
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	93,84
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	93,68
8	Kesetaraan Gender	91,43
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	90,52
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,22
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	86,00
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	85,71
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	80,00

- Indikator dengan Kinerja Sedang

Dari 22 indikator pada IDI Sumatera Utara terdapat 8 indikator masuk pada kategori Sedang. Kedelapan indikator tersebut tampil dalam tabel 6, yang diurutkan dari indikator poin terbesar sampai poin terkecil dalam kategori sedang. Indikator tertinggi dengan kinerja sedang adalah pada Indikator Pers yang Bebas dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (indikator 7) sebesar 75,92 poin dan yang terendah dalam kategori ini adalah Indikator Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah (indikator 18) sebesar 60,29 poin.

Tabel 6. Indikator dengan Kinerja Sedang Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2022

Indikator dengan kinerja sedang		2022
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75,92
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,11
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	74,11
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	73,53
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	69,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,51
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	64,71
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	60,29

- Indikator dengan Kinerja Buruk

Terdapat 2 indikator masuk pada kategori Buruk, yaitu Indikator Pemenuhan Hak-hak Pekerja (indikator 2) sebesar 59,21 dan indikator Kinerja Lembaga Legislatif (indikator 15) sebesar 28,12

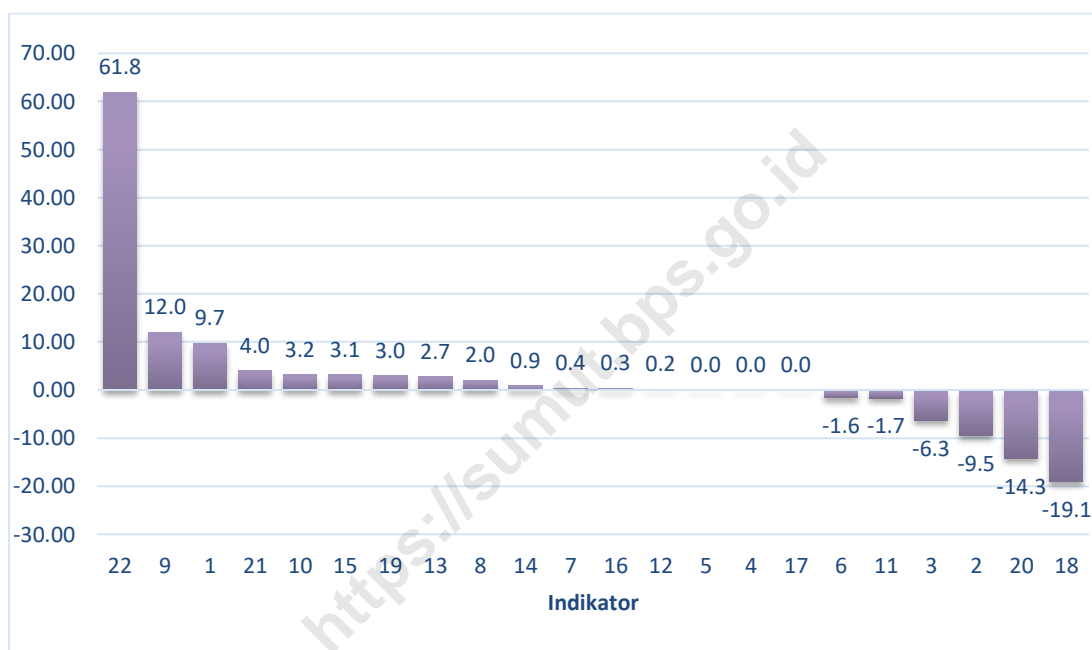
Tabel 7. Indikator dengan Kinerja Buruk Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2022

Indikator dengan kinerja buruk		2022
2	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,21
15	Kinerja Lembaga Legislatif	28,12

8. Perubahan Indeks Indikator pada Indeks Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021 - 2022

Jika dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, terdapat 14 indikator yang mengalami kenaikan dan ada 8 indikator yang mengalami penurunan.

Grafik 10. Nilai Perubahan Indikator IDI Sumatera Utara 2022 terhadap 2021 (poin)



Tabel 8. Indikator dengan Kinerja Naik

Indikator dengan kinerja naik		Besar Perubahan (poin)
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	61,82
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	12,00
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	9,74
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	4,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	3,17

Indikator dengan kinerja naik		Besar Perubahan (poin)
15	Kinerja lembaga legislatif	3,12
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	2,96
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	2,72
8	Kesetaraan gender	2,04
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0,87
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	0,40
16	Kinerja lembaga yudikatif	0,35
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0,17

Tabel 9. Indikator dengan Kinerja Turun

Indikator dengan kinerja turun		Besar Perubahan (poin)
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	-1,59
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	-1,69
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	-6,32
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	-9,48
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	-14,29
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	-19,12

LAMPIRAN

<https://sumut.bps.go.id>

Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021-2022 berdasarkan Aspek dan Provinsi

	Provinsi	IDI		Aspek					
				Kebebasan		Kesetaraan		Kapasitas Lembaga Demokrasi	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
11	Aceh	80,92	80,82	85,50	84,66	81,41	80,10	75,82	77,90
12	Sumatera Utara	77,60	79,53	88,51	87,66	75,27	77,71	69,63	73,71
13	Sumatera Barat	78,51	77,35	76,19	78,01	79,19	79,85	79,98	73,69
14	Riau	75,66	73,64	88,40	84,46	75,88	70,53	62,83	66,69
15	Jambi	72,91	77,19	66,50	77,13	75,67	74,04	75,91	81,01
16	Sumatera Selatan	78,63	80,59	85,08	86,78	78,51	80,86	72,41	74,15
17	Bengkulu	72,73	73,23	78,81	68,95	71,89	81,29	67,74	67,81
18	Lampung	80,18	78,32	76,64	79,90	81,62	79,37	81,96	75,52
19	Kep. Bangka Belitung	74,11	76,65	68,80	66,36	77,80	78,11	74,93	85,05
21	Kepulauan Riau	79,53	78,77	90,91	88,34	79,61	76,05	68,21	72,60
31	DKI Jakarta	82,08	82,13	89,27	87,39	85,67	85,34	70,69	73,12
32	Jawa Barat	79,72	83,34	89,71	90,61	72,99	82,61	77,93	77,05
33	Jawa Tengah	81,15	84,79	87,90	88,83	77,68	82,73	78,63	83,25
34	DI Yogyakarta	81,21	85,62	74,31	87,35	87,29	88,76	80,74	80,17
35	Jawa Timur	81,31	84,92	88,11	88,48	81,14	82,12	74,81	84,77
36	Banten	75,93	78,75	82,26	83,80	78,48	80,84	66,65	71,27
51	Bali	75,35	83,21	84,62	85,78	77,25	83,90	63,92	79,83
52	Nusa Tenggara Barat	72,69	73,38	77,41	76,75	80,15	77,24	59,10	65,44
53	Nusa Tenggara Timur	73,42	77,83	87,99	89,06	74,16	74,43	58,17	70,83
61	Kalimantan Barat	74,03	81,48	81,15	91,35	72,83	78,58	68,46	75,23
62	Kalimantan Tengah	73,17	79,30	76,09	82,05	75,07	77,61	68,02	78,62
63	Kalimantan Selatan	75,41	80,86	70,13	80,70	79,00	80,86	76,32	81,01
64	Kalimantan Timur	81,02	83,58	89,46	91,40	76,67	79,25	77,90	81,06
65	Kalimantan Utara	79,38	78,79	82,78	77,93	80,14	80,88	75,11	77,13
71	Sulawesi Utara	80,41	78,22	82,92	77,76	79,80	82,80	78,67	73,20
72	Sulawesi Tengah	77,95	80,92	92,76	81,69	70,39	81,51	72,38	79,46
73	Sulawesi Selatan	74,85	80,09	88,18	83,39	73,06	86,09	63,85	69,66
74	Sulawesi Tenggara	77,96	80,35	79,28	87,49	84,09	85,83	69,33	66,74
75	Gorontalo	77,01	73,74	81,57	65,31	81,46	82,21	67,18	71,92
76	Sulawesi Barat	71,30	74,03	67,24	67,78	81,75	83,46	62,80	68,90
81	Maluku	66,76	75,26	59,36	74,49	79,57	79,72	58,74	70,69
82	Maluku Utara	68,82	62,93	80,61	70,84	68,08	66,83	58,08	50,47
91	Papua Barat	68,68	64,02	82,47	53,64	67,84	74,47	56,10	61,77
94	Papua	66,39	66,65	75,64	67,23	62,30	67,85	62,15	64,63
	Nasional*	78,12	80,41	79,72	82,80	78,86	80,28	75,67	78,22
	Pusat	81,33	84,29	77,59	86,59	81,51	81,47	84,80	85,39
	Provinsi**	76,08	77,95	81,08	80,39	77,17	79,52	69,86	73,66

*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Tabel 2. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Aspek, dan Indikator 2021-2022

ASPEK / INDIKATOR		2021	2022
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA SUMATERA UTARA	77,60	79,53
A.	ASPEK KEBEBASAN	88,51	87,66
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	86,47	96,21
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	100,00	90,52
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	93,68
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	94,12	94,12
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	96,68	96,68
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	60,80	59,21
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75,52	75,92
B.	ASPEK KESETARAAN	75,27	77,71
8	Kesetaraan gender	89,39	91,43
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	74,00	86,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	66,50	69,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	68,20	66,51
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	93,67	93,84
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	70,81	73,53
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,24	74,11
C.	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	69,63	73,71
15	Kinerja lembaga legislatif	25,00	28,12
16	Kinerja lembaga yudikatif	85,87	86,22
17	Netralitas penyelenggara pemilu	64,71	64,71
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	79,41	60,29
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	71,15	74,11
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00	85,71
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	76,00	80,00
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	38,18	100,00



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISSN 2620-5696



9 772620 569007